

## BAB II KONTEKS SOSIAL POLITIK DESA WADAS

### 2.1 Profil Desa Wadas

#### 2.1.1 Kondisi Geografis

Desa wadas terletak di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 405.820 hektar yang terbagi menjadi 381.820 berupa tanah kering dan 24.000 hektar berupa tanah sawah. Desa ini memiliki topografi berupa perbukitan dan lembah, dengan dataran tertinggi mencapai 258 mdpl dan titik terendah 213 mdpl. Desa Wadas terletak ditengah Kecamatan Bener dan berbatasan langsung dengan beberapa desa sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Pekacangan
- b. Sebelah Selatan : Desa Kaliwader
- c. Sebelah Timur : Desa Cacaban Kidul
- d. Sebelah Barat : Desa Kedungloteng

**Gambar 2.1 Peta Wilayah Wadas**



Sumber : [desawadas.wordpress.com](http://desawadas.wordpress.com), 2019

Kawasan Desa Wadas dibelah oleh sungai yang bernama Sungai Juweh. Oleh karenanya, pemukiman penduduk tersebar mengikuti aliran sungai yang membentang panjang. Secara administratif desa ini terbagi menjadi 4 RW dan 11 RT yang mana setiap RT disertai dengan dusun/dukuh. Meski begitu dari kesebelasan RT hanya terdapat 4 Kepala Dusun. Hal ini digambarkan pada Gambar 2.2 mengenai wilayah administrasi Desa Wadas

**Gambar 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Desa Wadas**



Sumber : [desawadas.wordpress.com](http://desawadas.wordpress.com), 2019

### **2.1.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Kondisi demografi suatu daerah akan menentukan jumlah masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, berikut adalah data table kenaikan penduduk di Desa Wadas dari tahun 2019 - 2021:

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Desa Wadas**

<b>Tahun</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
2019	645	662	1.307
2020	741	714	1.455
2021	771	748	1.519

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purworejo, 2021*

Berdasarkan data kependudukan Badan Pusat Statistika Kabupaten Purworejo. Jumlah penduduk di Desa Wadas terus mengalami peningkatan hal itu bisa dilihat dari peningkatan jumlah laki laki dan perempuan setiap tahunnya yang selalu meningkat.

Dari sisi sosial, Desa Wadas memiliki kohesi sosial yang relatif kuat sebagaimana lazimnya desa-desa di Jawa. Namun konflik Wadas yang berkepanjangan sejak tahun 2018 telah menciptakan polarisasi di dalam masyarakat antara kelompok yang menolak dan yang menerima proyek penambangan. Polarisasi ini tidak hanya bersifat horizontal antar warga, tetapi juga vertikal antara warga dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah. Kondisi ini turut mempengaruhi iklim sosial-politik di desa, termasuk dalam konteks Pemilu 2024.

## **2.2 Konflik Penambangan Batu Andesit dan Bendungan Bener**

### **2.2.1 Kronologi Konflik**

Agenda pokok pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla adalah pembangunan infrastruktur hal ini termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMN) 2015 - 2019. Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah menekankan berbagai proyek strategis nasional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan proyek proyek tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Percepatan Proyek Strategi Nasional.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia (PUPR RI) dalam peraturan Nomor 27/PRT/M/2015 menjelaskan bahwa waduk atau bendungan adalah struktur yang terbuat dari timbunan tanah, batuan, dan beton yang dirancang untuk menampung air serta menyimpan air tambahan.

Pembangunan Bendungan Bener, yang terletak di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, direncanakan sebagai salah satu Bendungan tertinggi di Indonesia dengan luas area 550 hektar, terdiri dari 295 hektar di Kabupaten Purworejo dan 265 hektar di Kabupaten Wonosobo.

Pembangunan Bener sendiri memerlukan 1.421 pembebasan bidang tanah, Sebagian besar merupakan lahan kering, ladang, sawah, rumah warga serta pemakaman. Untuk pengadaan tanah ini diperlukan kesepakatan antara pemegang hak tanah dan instansi yang memerlukan tanah melalui mekanisme musyawarah. Namun dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas tidak berjalan mulus karena adanya penolakan jika tanah mereka dijadikan objek untuk proyek tersebut.

Pembangunan Bendungan Bener sendiri memerlukan batu andesit sebagai material utama untuk pembangunan struktur bendungan. Berdasarkan surat

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018 tentang persetujuan Lokasi pengadaan tanah, menetapkan Desa Wadas, Kecamatan Bener sebagai lokasi pengambilan batu andesit untuk tujuan Pembangunan Bendungan Bener. Hal ini menimbulkan konflik dengan Sebagian warga setempat. Karena warga tidak diberitahu dan tidak diajak berunding terkait proyek pembangunan, sehingga menimbulkan keresahan dan kebingungan diantara mereka.

Warga wadas terus menunjukkan rasa penolakan mereka terhadap proyek pembangunan Bendungan Bener karena mereka merasa proyek tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan mereka, karena pembebasan lahan yang merupakan tempat mata pencaharian mereka sehari hari.

### **2.2.2 Aktor yang Terlibat**

Konflik Wadas melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang saling berbenturan. Dari sisi pemerintah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pemrakarsa Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo yang mengeluarkan persetujuan lokasi penambangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pelaksana pengadaan tanah, serta aparat kepolisian dan TNI yang menuai kritik keras akibat tindakan represif pada Februari 2022

Dari sisi masyarakat, terdapat warga Desa Wadas yang tergabung dalam Paguyuban Petani Desa Wadas sebagai kelompok yang menolak penambangan, yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dan berbagai organisasi masyarakat sipil. Di sisi lain, terdapat pula kelompok warga yang menerima dan mendukung proyek tersebut, meskipun jumlahnya lebih kecil. Posisi

Ganjar Pranowo sebagai gubernur menjadi titik fokus serangan kritik dari kelompok penolak, sekaligus menjadi kontroversial ketika ia kemudian mencalonkan diri sebagai presiden.

### **2.2.3 Pro dan Kontra**

Pihak-pihak yang mendukung proyek berargumen bahwa Bendungan Bener akan memberikan manfaat jangka panjang berupa irigasi pertanian untuk ratusan ribu hektar sawah di Purworejo, Kebumen, dan Wonosobo; penyediaan air baku untuk jutaan penduduk; potensi pembangkit listrik tenaga air; serta pengurangan risiko banjir di wilayah hilir. Mereka juga berargumen bahwa warga yang tanahnya dibebaskan akan mendapatkan ganti rugi yang layak.

Sementara itu, pihak penolak berargumen bahwa penambangan batu andesit di lahan pertanian Desa Wadas akan merusak ekosistem lokal secara permanen, menghilangkan sumber air bersih yang selama ini dimanfaatkan warga, mengancam mata pencaharian petani yang bergantung pada kesuburan lahan perbukitan, dan berpotensi menyebabkan longsor mengingat topografi desa yang berbukit. Lebih dari itu, warga penolak mempermasalahkan proses yang tidak partisipatif dan tidak transparan sejak awal perencanaan, serta tindakan represif aparat yang mereka nilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat yang sedang mempertahankan haknya.

## **2.3 Pemilu di Desa Wadas Tahun 2024**

### **2.3.1 Peta Perolehan Suara**

Hasil rekapitulasi KPU pada Pemilu Presiden 14 Februari 2024 menunjukkan bahwa di tingkat Desa Wadas, pasangan Prabowo-Gibran berhasil meraih suara terbanyak dengan 376 suara (45,3%), diikuti Ganjar-Mahfud dengan 283 suara (34,1%), dan Anies-Muhaimin dengan 173 suara (20,8%). Secara agregat, Prabowo-Gibran menang dengan selisih 93 suara atas Ganjar-Mahfud di tingkat desa.

Namun gambaran agregat ini menyembunyikan variasi yang sangat signifikan di tingkat TPS. Pada level kecamatan, justru Ganjar-Mahfud meraih suara terbanyak di Kecamatan Bener dengan 16.776 suara, mengalahkan Prabowo-Gibran (14.697 suara). Fakta ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Ganjar di kecamatan ini tetap kuat secara keseluruhan, dan Desa Wadas yang secara khusus menjadi episentrum konflik memiliki dinamika internalnya sendiri yang berbeda dari tren kecamatan

### **2.3.2 Distribusi Suara per TPS**

Distribusi suara per TPS di Desa Wadas menampilkan pola yang sangat tidak merata dan menarik secara analitis. Dari enam TPS yang ada, Prabowo-Gibran menang di TPS 1, 3, dan 4; Anies-Muhaimin menang di TPS 5; sedangkan Ganjar-Mahfud hanya menang di TPS 2 dan TPS 6. Pola distribusi ini tidak bersifat acak, melainkan memiliki korelasi dengan letak geografis dusun dan tingkat keterdampakan langsung warga dari proyek penambangan. TPS 1 dan TPS 3 yang terletak di dusun-dusun yang lebih dekat dengan area rencana penambangan menunjukkan dominasi Prabowo-Gibran. Sebaliknya, TPS 2 (Dusun Beran) dan TPS 6 (Dusun Kalimanggis) yang secara geografis lebih jauh dari titik konflik

menunjukkan dominasi Ganjar-Mahfud. Pola ini menjadi salah satu hipotesis awal yang mengarahkan penelitian ini pada pentingnya faktor keterdampakan langsung dalam membentuk perilaku pemilih.

### **2.3.3 Karakteristik TPS 2 dan TPS 6**

TPS 2 berlokasi di Dusun Beran, yang merupakan salah satu dusun di bagian barat Desa Wadas. Dusun Beran tidak berada di kawasan yang ditetapkan sebagai lokasi penambangan batu andesit, sehingga warganya tidak merasakan ancaman penggusuran lahan secara langsung. Mayoritas warga Beran bermata pencaharian di luar sektor pertanian tradisional, termasuk wiraswasta, perdagangan, dan terdapat sejumlah pemuda yang mengenyam pendidikan tinggi atau bekerja di sektor jasa.

TPS 6 berlokasi di Dusun Kalimanggis, yang terletak di bagian timur Desa Wadas. Sama halnya dengan Beran, Kalimanggis tidak berada di zona langsung terdampak penambangan. Komposisi penduduknya lebih heterogen dengan kehadiran warga yang bekerja sebagai PNS, petani muda, dan wirausahawan. Dusun ini juga memiliki akses informasi yang relatif lebih baik melalui media sosial dibandingkan dusun-dusun yang lebih terisolir.

Perbedaan karakteristik geografis dan sosio-ekonomi antara TPS 2 dan TPS 6 dengan TPS lainnya ini menjadi konteks penting untuk memahami perbedaan pilihan politik yang terjadi di antara warga Desa Wadas dalam Pemilu Presiden 2024.

## **2.4 Posisi Ganjar dalam Konflik Wadas**

Posisi Ganjar Pranowo dalam Konflik Wadas bersifat paradoks dan kompleks. Sebagai Gubernur Jawa Tengah yang menjabat dua periode (2013–2023), Ganjar berada di persimpangan antara kewenangannya sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di satu sisi, dan tanggung jawab moralnya sebagai pemimpin yang harus melindungi hak-hak warganya di sisi lain. Dua peran yang saling bertabrakan ini membentuk narasi yang tidak tunggal tentang sosok Ganjar dalam benak masyarakat Desa Wadas.

Dari sisi kebijakan formal, Ganjar Pranowo terlibat langsung dalam konflik Wadas melalui penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018 tentang Persetujuan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener. Surat keputusan inilah yang secara resmi menetapkan Desa Wadas sebagai lokasi penambangan batu andesit. Keputusan ini diambil tanpa melalui proses konsultasi publik yang memadai dengan warga Desa Wadas, sehingga memicu penolakan kolektif yang kemudian berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Dalam perspektif warga penolak, Ganjar dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas seluruh rangkaian permasalahan yang timbul akibat rencana penambangan tersebut.

Dari sisi respons terhadap konflik, posisi Ganjar tidak sepenuhnya negatif. Pada beberapa kesempatan, Ganjar turun langsung ke Desa Wadas untuk berdialog dengan warga. Langkah blusukan ini, yang menjadi ciri khas gaya kepemimpinan Ganjar, disambut positif oleh sebagian warga sebagai bukti bahwa sang gubernur

mau mendengarkan aspirasi rakyat. Ganjar juga sempat menyatakan bahwa warga berhak menyampaikan penolakan dan tidak ada pihak yang boleh dipaksa melepaskan lahannya. Pernyataan-pernyataan semacam ini beredar luas di media sosial dan membentuk narasi tandingan yang melunak terhadap citra negatif Ganjar dalam kasus Wadas.

Titik kritis yang paling menentukan citra negatif Ganjar dalam Konflik Wadas adalah peristiwa Februari 2022. Pada saat itu, aparat kepolisian dan TNI melakukan penangkapan terhadap sekitar 78 warga Desa Wadas yang sedang mempertahankan lahan mereka. Tindakan represif ini mendapat liputan masif dari media nasional dan media sosial, dan memunculkan framing yang kuat: bahwa Ganjar sebagai gubernur tidak mampu atau tidak mau mencegah kekerasan aparat terhadap rakyatnya sendiri. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dan berbagai organisasi masyarakat sipil mengecam keras tindakan tersebut, dan nama Ganjar menjadi sasaran utama kritik karena dinilai telah membiarkan tindakan represif itu terjadi.

Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh data elektoral Pemilu 2024, framing negatif ini tidak berlaku secara merata di seluruh wilayah Desa Wadas. Perbedaan mendasar terletak pada jarak geografis dan tingkat keterdampakan langsung warga terhadap proyek penambangan. Warga yang lahannya masuk dalam area rencana penambangan yang sebagian besar bermukim di dusun-dusun yang menjadi basis TPS 1 dan TPS 3 merasakan ancaman konkret dan langsung atas keberlangsungan hidup mereka. Bagi kelompok ini, Ganjar adalah figur yang secara langsung

mengancam sumber penghidupan mereka, sehingga pilihan untuk tidak memilih Ganjar menjadi ekspresi yang logis dan konsisten.

Sebaliknya, warga Dusun Beran (TPS 2) dan Dusun Kalimanggis (TPS 6) tidak merasakan dampak penambangan secara langsung karena kedua dusun tersebut berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai area penambangan. Bagi kelompok ini, Kasus Wadas diproses sebagai informasi yang diperoleh melalui media, bukan sebagai pengalaman personal yang mengancam. Dalam kondisi ini, mereka memiliki ruang yang lebih leluasa untuk mempertimbangkan rekam jejak Ganjar secara lebih holistik tidak hanya dari satu peristiwa konflik, tetapi juga dari seluruh kinerja sepuluh tahun kepemimpinannya sebagai gubernur.

Posisi paradoks Ganjar dalam Konflik Wadas inilah yang menjadi konteks kunci untuk memahami penelitian ini. Satu tokoh yang sama, dengan satu catatan kebijakan yang sama, menghasilkan respons elektoral yang berbeda di antara sub-komunitas yang berada dalam satu desa. Fenomena ini menegaskan bahwa perilaku pemilih tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh satu variabel tunggal berupa ada atau tidaknya konflik, melainkan sangat dipengaruhi oleh seberapa dekat dan seberapa nyata dampak konflik itu dirasakan oleh masing-masing pemilih secara personal.

## **BAB III FAKTOR KEMENANGAN GANJAR – MAHFUD PADA TPS 2 DAN 6**

Berdasarkan hasil wawancara, dan dokumentasi dengan informan kunci warga Wadas yang memilih dan tidak memilih Ganjar - Mahfud di TPS 2 dan 6 pada Pemilu tahun 2024 kemarin. Perolehan suara yang didapat pasangan Ganjar - Mahfud tentunya disebabkan oleh banyak faktor yang bekerja secara simultan dan saling berhubungan serta mempengaruhi, bukan hanya keberuntungan semata.

Dalam bab ini penulis memaparkan temuan penelitian berdasarkan wawancara mendalam dengan informan di Desa Wadas. Penelitian ini sendiri bermaksud menjelaskan mengapa Ganjar – Mahfud bisa mendapatkan kemenangan di TPS 2 dan TPS 6 Desa Wadas di tengah Desa yang identik dengan konflik yang melibatkan nama Ganjar Pranowo secara langsung.

### **3.1 Persepsi Masyarakat Terhadap Ganjar Pranowo**

Dalam melihat perolehan suara Ganjar Pranowo salah satu faktor yang paling penting dan tidak bisa diabaikan adalah persepsi masyarakat terhadap Ganjar Pranowo itu sendiri. Sebelum faktor yang lain bekerja semua informasi yang diterima oleh harus terlebih dahulu melalui persepsi pemilih. Oleh karena itu, diskursus pertama akan diarahkan pada faktor yang bersumber dari Ganjar Pranowo sendiri dalam membangun Persepsi dirinya sendiri untuk sukses memenangkan kontestasi electoral dalam Pemilu Presiden tahun 2024.

Persepsi dalam penelitian ini bukan sekadar "pendapat" informan tentang Ganjar melainkan mekanisme antara (*intervening mechanism*) yang menjelaskan